

ABSTRAK

Firman Wahyudi, NIM. 200311020072: “*Formulasi Hukum Pembuktian Terbalik (Omkering Van Het Bewijslast) Dalam Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 (Upaya Mengembangkan Hukum Acara Peradilan Agama).*” Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A., Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Disertasi. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2025.

Kata kunci: *Formulasi, Pembuktian Terbalik, Strict Liability, Fatwa DSN*

Pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berpedoman pada asas umum pembuktian namun juga menganut asas pembuktian terbalik terhadap perkara tertentu. Terdapat *lex specialist* terhadap ketentuan ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar*. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang kerugian usaha dan pemilik modal menuntut pengelola untuk mengembalikan modal, maka wajib bagi pengelola membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh *ta’addi*, *tafrith* dan *mukhalafath al-syuruth*. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 mengandung norma hukum pembuktian terbalik yang selama ini belum diatur secara khusus dalam hukum acara ekonomi syariah. Kevakuman hukum ini akan berpotensi melahirkan ketidakseimbangan dalam praktik pembebanan alat bukti kepada pihak yang bersengketa.

Disertasi ini bertujuan untuk: 1). Mengeksplorasi konsep pembuktian terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2). Menemukan *ratio legis* dibalik penerapan hukum pembuktian terbalik dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yuridis dan filosofis. 3). Membangun formulasi hukum dan mekanisme pembuktian terbalik dalam fatwa DSN sebagai bentuk pengembangan dan pembaharuan hukum acara peradilan agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer adalah Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Adapun bahan hukum sekunder berupa kitab, buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu preskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, norma hukum pembuktian terbalik dalam fatwa DSN dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan pemilik modal terkait unsur *ta’addi* (melampaui batas), *tafrith* (kelalaian) dan *mukhalafath al-syuruth* (melanggar perjanjian) yang dilakukan pengelola modal

karena kunci pengelolaan usaha berada pada pengelola modal. Latar belakang ini juga ditemukan dalam UU Nomor 8 tahun 1999, dimana konsumen mengalami kesulitan membuktikan terjadinya kesalahan produksi barang karena kunci produksi dipegang oleh pelaku usaha.

Kedua, menurut Nazih Hammad, pembuktian terbalik dalam perspektif ekonomi syariah didasarkan pada 4 (empat) faktor, pertama, *urf*, yaitu pergeseran norma yang mengubah paradigma hukum asal tentang bebasnya tanggungjawab pengelola modal menjadi bersifat tidak mutlak (relatif). Kedua, *tuhmah* yaitu praduga/persangkaan terhadap pengelola terkait adanya unsur kesalahan dalam menjalankan usaha, ketiga, *masalahah*, yaitu modal yang dikucurkan harus terjaga dari bentuk kelalaian dan kesengajaan pengelola. Dan ke empat, *dalalah al-hal* yaitu petunjuk (*qarinah*) yang mengarah kepada fakta tentang benar tidaknya pengelola dalam mengelola modal. Dalam konteks yuridis, penerapan hukum pembuktian terbalik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal yang beriktikad baik. Secara filosofis, pembuktian terbalik bertujuan memberikan keadilan substantif dan berimbang kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ketiga, formulasi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN bersumber dari prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang lahir dari perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Sebagai 2engah2 pembaruan hukum acara ekonomi syariah, maka mekanisme pembuktian terbalik diterapkan dengan 3 (tiga) metode, pertama, tergugat (pengelola) harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dalam pengelolaan usaha. Kedua, beban alat bukti lebih dimaksimalkan kepada pihak tergugat (pengelola modal). Ketiga, seluruh dalil yang menjadi gugatan penggugat harus dibuktikan secara sebaliknya (negatif) oleh pihak tergugat.

ABSTRACT

Firman Wahyudi, Student ID Number 200311020072, “*The Formulation of reseval burden of proof (Omkering Van Het Bewijslast) in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 (Efforts to Develop Religious Court Procedure Law)*”. Advisor I. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, M.A. Advisor II. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Postgraduate of UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Keywords: Formulation, Reseval burden of proof, strict liability, fatwa of the Indonesian Ulema Council

The Proof in resolving sharia economic disputes is not only guided by the general principles of proof but also adheres to the reverse principle of proof for certain cases. There is a lex specialist for this provision based on DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for *mudharabah*, *musyarakah* and *wakalah bil istitsmar* financing. In cases where business losses occur, the capital owner (investor) demands the capital manager (entrepreneur) to return the capital, it is mandatory for the capital manager (entrepreneur) to prove that the losses are not caused by *ta’addi*, *tafrith* and *muhkalafath al-syuruth*. DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 contains the legal norm of reseval burden of proof which so far has not been specifically regulated in the procedural law for resolving sharia economic. This rechtvakum will be potential to give rise to imbalances in the practice of imposing evidence on the parties.

This dissertation aims to explore: 1). Exploring the concept of reverse proof in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 2). Finding the legal ratio behind the application of the law of reverse evidence in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 from sharia economic law, juridical and philosophical perspectives. 3). Developing legal formulations and reverse evidence mechanisms in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 as a form of development and renewal of religious court procedural law.

This type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The primary legal material in this research is DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for *mudharabah*, *musyarakah* and *wakalah bil istitsmar* financing and Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. The secondary legal materials are in the form of books, books and research journals related to the research topic. The analytical methods used are prescriptive and comparative.

The results of the research show Firstly, the legal concept of reverse proof which are contained in the DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 was caused by the difficulty of proving by the Plaintiff (Capital Owner) regarding the elements of error (*ta'addi*, *tafrith* and *mukhalaftih al-syuruth*) which was carried out by the Defendant (Business Manager) because the key to managing the business/enterprise was held and controlled by the capital manager. This background is also found in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection where consumers as Plaintiffs get difficulties in proving that errors occurred in the production of goods because the secret to the production procedures themselves is held by the business actor.

Second, according Nazih Hammad, reseval burden of proof in a sharia economic perspective is based by 4 (four) factor, first, *urf*, there is a shift in values that changes the original legal stigma about freedom of responsibility for capital managers to be non-absolute (relative). Second, *tuhmah*, the principle of presumption of guilt/suspect towards capital managers about the existence of human error (*ta'addi*, *tafrith* and *mukhlaftih al-syuruth*) in operating a business. Third, *maslahah*, the capital provided by the capital owner must be guarded and maintained from any form of negligence and intentional capital management. The fourth, *dalalah al-hal*, namely the existence of instructions and indication (*qarinah*) which shows to facts about whether or not the capital manager in operating the business. In legal context, the application of the law of reverse burden of proof aims to provide legal protection to capital owners who act in good faith. As for philosophically, the application of the law of reseval burden of proof aims to provide substantive and balanced justice to the parties in resolving sharia economic disputes.

Third, the legal formulation of reverse evidence built in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 originates from the principle of absolute responsibility (strict liability) as a form of trust that is born from an agreement between capital owners and managers. As a form of reform of sharia economic procedural law, reverse proof mechanism is applied using 3 (three) methods, first, the Plaintiff (capital owner) is limited to proving the nominal material loss suffered while the Defendant (manager) must prove whether there was an error in business management. Secondly, the burden of evidence is maximized on the Defendant (capital manager) in terms of disclosing data and witnesses. Third, all the arguments that constitute the Plaintiff's claim must be proven otherwise (negatively) by the defendant.

مستخلص البحث

فرمان وحيودي. ر.س.ج. 200311020072 "صياغة نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/2016/105 (الجهد لتطوير قانون إجراءات المحاكم الشرعية)". المشرف الأول الأستاذ الدكتور الحاج عبد الحفيظ أنصاري الماجستير. المشرف الثاني الأستاذ الدكتور الحاج جلال الدين الماجستير. الدراسات العليا في جامعة أنتاساري بنجرماسين الإسلامية الحكومية. 2025.

الكلمات المفتاحية : الصياغة, نقل عبء الإثبات, المسؤولية المطلقة, فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

التدليل في إثبات المنازعات في قانون الإجراءات الإقتصادية الشرعي لا يسترشد بالمبادئ العامة للإثبات فحسب، بل يلتزم أيضاً بمبدأ نقل عبء الإثبات في حالات معينة. هناك قاعدة مخصوصة بناءً على فتوى هي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 عن ضمان عودة رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار. في الحالات التي تحدث فيها خسائر تجارية بحيث يدعي صاحب المال الى المضارب بإعادة رأس المال وجب على المضارب الإثبات ان الخسائر التي صدرت ليست بسبب تعدي وتفريط و مخالفة الشروط. تحتوي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 عن ضمان عودة رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار على القاعدة القانونية لنقل عبء الإثبات التي لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل محدد في القانون الإجرائي لحل المنازعات الاقتصادية الشرعية الأمر الذي قد يؤدي نتيجة لذلك إلى حدوث اختلالات في ممارسة فرض الأدلة على الأطراف.

تهدف هذه الرسالة إلى اكتشاف: (1). استكشاف مفهوم نقل عبء الإثبات في الفتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 والقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن حماية المستهلك (2). إيجاد النسبة القانونية وراء تطبيق قانون نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 من جهة القانون الاقتصادي الشرعي وجهة فقهي وفلسفي. (3). وبناء تطوير الصياغات القانونية وآليات نقل عبء الإثبات في فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 لتطوير وتحديد قانون الإجرائية في المحاكم الدينية.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ذو نخب قانوني ومفاهيمي. المادة القانونية الأساسية في هذا البحث هي فتوى DSN رقم DSN-MUI/X/2016/105 بشأن ضمان عوائد رأس المال لتمويل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. أما المواد القانونية الثانوية فهي على شكل كتب وكتب ومجلات بحثية ذات صلة بموضوع البحث. الأساليب التحليلية المستخدمة هي توجيهية ومقارنة.

نتائج هذه البحث أولاً أن البناء القانوني لنقل عبء الإثبات المبينة في فتوى DSN-رقم 105/DSN-2016/MUI/X كان مدفوعاً بصعوبة إثبات المدعي (صاحب المال) توجد هذه الخلفية أيضاً في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك حيث يواجه المستهلكون كمدعين صعوبات في إثبات حدوث أخطاء في إنتاج السلع لأن مفتاح إجراءات الإنتاج نفسها يملكه الممثل التجاري. ثانياً، عند نازيح حماد فإن القاعدة القانونية لنقل عبء الإثبات في فتوى رقم 105/DSN-MUI/X/2016 ترجع إلى 4 (أربعة) عناصر، أولاً، العرف، هو قيمة في المجتمع الذي يتحول القاعدة نموذج الحكم الأصلي عن براءة المضارب أن لا تكون مطلقة. ثانياً الطهمة هي الظن الذي يتعلق بوجود عناصر التقصير والأفعال غير المشروعة المضارب في إدارة الأعمال، ثالثاً المصلحة هي حماية رأس المال المصروف من الإهمال والتصرفات المتعمدة من قبل المدير ورابعاً دلالة الحال هي الإرشاد (القرينة) التي تؤدي إلى معرفة صحة إدارة المضارب لرأس المال من عدمها. وفي الناحية قانوني، فإن نقل عبء الإثبات في فتوى DSN يهدف إلى توفير الحماية القانونية لصاحب المال ذوي النوايا الحسنة. أما من الناحية الفلسفية فإن تطبيق نقل عبء الإثبات يهدف إلى توفير العدالة الموضوعية والمتوازنة للأطراف في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية. ثالثاً: إن الصياغة القانونية لنقل عبء الإثبات الواردة في الاقتصاد الإسلامية تنبع من مبدأ المسؤولية المهنية هو شكل من أشكال الثقة التي صدرت من الاتفاق بين صاحب المال و المضارب. يتم تطبيق صياغة نقل عبء الإثبات باستخدام 3 (ثلاث) طرق، أولاً يقتصر المدعي (صاحب المال) على إثبات الخسائر المادية، أما للمضارب يجب عليه إثبات ما إذا كانت هناك أخطاء في إدارة الأعمال. ثانياً، يتم تعظيم عبء الأدلة على المدعى عليه (المضارب) سواء من حيث الكشف عن البيانات أو الشهود. ثالثاً، جميع الحجج التي تشكل ادعاء المدعي يجب أن يثبت خلاف ذلك (سلبياً) من قبل المدعى عليه.